

Pemberdayaan Guru sebagai Relawan untuk Mencegah Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Malaysia

Erna Risnawati¹, Siti Utami Dewi Ningrum², Muktia Pramitasari³, Mani Festati Broto⁴, Anto Hidayat⁵, Jupri Bacotang⁶

^{1,2,3,4,5} Universitas Terbuka, Indonesia

⁶ Universitas Malaysia Sabah, Malaysia

* Correspondence e-mail; siti.ningrum@ecampus.ut.ac.id

Article history

Submitted: 2026/05/06; Revised: 2026/05/28; Accepted: 2026/06/11

Abstract

Violence against children and women remains a significant concern within Indonesian migrant worker communities in Sabah, Malaysia, especially in plantation areas where access to protection services and reporting systems is limited. Teachers at Community Learning Centers (CLCs) are in a strategic position to help prevent and respond to such cases, yet many lack adequate knowledge and skills. This community service program aimed to strengthen teachers' capacity as violence prevention volunteers. The program was implemented by Universitas Terbuka in collaboration with Universiti Malaysia Sabah and FGV Holdings Berhad, involving 45 teachers from nine CLCs. Participants attended a three-day training program covering violence prevention, child protection, cyberbullying awareness, reporting procedures, case management, and educational media development. Evaluation results showed substantial improvement in participants' understanding, with knowledge levels increasing from around 60% before training to over 90% afterward. The program also established a Reading Corner and educational resources to support sustainable violence prevention efforts in vulnerable communities.

Keywords

migrant workers; teacher empowerment; violence against children; violence prevention; vulnerable communities



© 2026 by the authors. This is an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

1. PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap anak dan perempuan merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi masyarakat global, khususnya di komunitas rentan seperti pekerja migran. Kekerasan ini mencakup berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran, yang berdampak pada kesehatan mental dan perkembangan sosial korban dalam jangka panjang. Menurut Praptini & Wilani (2024), kekerasan pada anak sering kali menimbulkan dampak jangka panjang berupa trauma psikologis dan emosional yang sulit dipulihkan. WHO mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindakan atau usaha seksual yang tidak diinginkan, yang sering kali sulit dilaporkan karena stigma sosial dan tekanan dari pelaku (World Health Organization & Pan American Health Organization (WHO), 2013).

Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA) Indonesia yang menunjukkan peningkatan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dari 12.285 kasus pada tahun 2019 menjadi 15.972 kasus pada tahun 2022 (SIMFONI-PPA, n.d.). Angka ini mencerminkan tren peningkatan yang signifikan serta urgensi untuk menerapkan upaya pencegahan yang lebih efektif, khususnya di kalangan anak-anak dan perempuan di komunitas yang rentan. Sementara itu, di Malaysia, terutama di wilayah perkebunan kelapa sawit, pekerja migran Indonesia menghadapi tantangan besar berupa kekerasan dan perlindungan hukum yang minim. Meskipun sektor perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian, pekerja migran Indonesia di sektor ini sering menghadapi risiko kekerasan. Penelitian oleh Hamdi (2021) dan Safitri & Wibisono (2023) menunjukkan bahwa kekerasan terhadap pekerja migran mencakup kekerasan fisik, seksual, dan psikologis, yang sering kali tidak dilaporkan karena keterbatasan akses ke layanan sosial serta ketakutan akan retaliasi atau pemutusan hubungan kerja.

Laporan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengungkapkan bahwa banyak pekerja migran Indonesia mengalami kekerasan selama bekerja di Malaysia. Dalam data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2023, mayoritas korban kekerasan di kalangan Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) berusia 18 hingga 40 tahun, dengan total 209 orang, menunjukkan bahwa kelompok usia ini paling rentan terhadap kekerasan. Selain itu, terdapat 33 korban berusia 41 hingga 60 tahun, serta 11 korban yang masih tergolong anak-anak berusia 13 hingga 17 tahun. Dari segi pendidikan, korban kekerasan terdiri dari 41 orang dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), 68 orang lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), 51 orang lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 2 orang berlatar belakang Perguruan Tinggi (PT), sementara 95 orang tingkat

pendidikannya tidak teridentifikasi. Data ini mengindikasikan bahwa PPMI dengan pendidikan SMP dan SMA lebih rentan mengalami kekerasan. Berdasarkan kategori jenis kekerasan, kekerasan ekonomi menjadi yang paling dominan dengan 137 kasus (43%), diikuti oleh kekerasan psikis sebanyak 80 kasus (25%), kekerasan fisik sebanyak 63 kasus (20%), dan kekerasan seksual sebanyak 34 kasus (10%) (Komnas Perempuan, 2024).

Kondisi tersebut tidak hanya terjadi pada pekerja migran Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian di Malaysia secara umum. Abdul-Ghani (2014) menemukan bahwa perempuan korban kekerasan domestik di Malaysia sering menghadapi hambatan budaya, tekanan keluarga, dan ketakutan terhadap stigma sosial sehingga enggan melaporkan kekerasan yang dialami. Demikian pula, Fallahi et al. (2015) menjelaskan bahwa meskipun Malaysia telah memiliki berbagai kebijakan nasional terkait perlindungan perempuan, implementasi perlindungan di tingkat komunitas masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada kelompok rentan yang memiliki akses terbatas terhadap layanan sosial dan layanan hukum.

Menurut laporan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dari sekitar 2,7 juta pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia, hanya 1,6 juta yang bekerja melalui jalur resmi sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah, sedangkan selebihnya bekerja melalui jalur nonprosedural. Pekerja migran non prosedural terjadi akibat faktor ekonomi hingga kurangnya edukasi tentang pekerja migran Indonesia (Samad et al., 2023). Mereka sering kali bekerja dalam kondisi yang tidak layak tanpa perlindungan hukum yang memadai (Febrianti & Afifah, 2023; Hidayah et al., 2015).

Di Sabah, khususnya di kawasan perkebunan kelapa sawit, situasi buruh migran semakin diperparah oleh keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan (Annisa, 2021; Damayanti et al., 2023; Windary, 2022). Anak-anak pekerja migran di wilayah ini sering kali mengalami penelantaran pendidikan yang berpotensi memperbesar resiko kekerasan dan eksploitasi di masa depan (Sholina, 2022). Kondisi geografis yang terpencil membatasi akses komunitas pekerja migran terhadap informasi dan perlindungan hukum yang memadai. Untuk menjembatani kondisi tersebut, muncul beberapa upaya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak pekerja migran, salah satunya melalui *Community Learning Center* (CLC) FGV Sahabat.

CLC FGV Sahabat merupakan lembaga pendidikan dasar bagi anak-anak PMI di wilayah Perkebunan sawit di wilayah Lahad Datu. Sekolah ini berada di wilayah perkebunan sawit yang dikelola oleh FGV Holdings Berhad Sabah. CLC FGV Sahabat Baru mencakup tingkat sekolah dasar (SD) sejak dua tahun terakhir, tanpa fasilitas

pendidikan tingkat SMP. Keterbatasan ini menjadikan anak-anak PMI rentan terhadap penelantaran pendidikan, yang memperburuk risiko eksploitasi dan kekerasan di masa depan.

Melihat kondisi tersebut, dalam PkM ini dipilih CLC FGV Sahabat sebagai mitra yang dinilai strategis dan sesuai dengan tujuan pelaksanaan PkM. Selain itu, pemilihan CLC FGV Sahabat juga karena CLC berdiri di bawah program CSR FGV Holdings Berhad, perusahaan kelapa sawit terbesar di dunia, dengan harapan bahwa kerja sama yang telah dijalin dengan FGV serta masuknya program Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat menggugah perusahaan untuk meningkatkan fasilitas.

Berdasarkan hasil diskusi awal dan analisis kebutuhan yang dilakukan bersama pengelola CLC FGV Sahabat sebelum program dilaksanakan, ditemukan bahwa sebagian besar guru belum pernah memperoleh pelatihan formal terkait identifikasi, pencegahan, maupun penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Guru juga menyampaikan bahwa mereka beberapa kali menemukan indikasi permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan fisik, pengabaian dalam pengasuhan, pernikahan usia dini, serta kerentanan terhadap kekerasan berbasis gender di keluarga pekerja migran. Namun demikian, sebagian besar guru mengaku belum memahami prosedur pelaporan, mekanisme rujukan kasus, maupun pihak yang dapat dihubungi ketika menemukan indikasi kekerasan. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas guru sebagai garda terdepan dalam perlindungan anak dan perempuan di lingkungan CLC.

Guru-guru di CLC FGV Sahabat memiliki peran vital, tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai figur pelindung bagi anak-anak, karena mereka merupakan salah satu pihak yang terlibat langsung dalam keseharian anak-anak PMI. Guru di CLC FGV Sahabat menghadapi banyak tantangan dalam menjalankan peran sebagai pelindung. Pemberdayaan guru dalam mengenali dan mencegah kekerasan sangat penting, mengingat peran mereka sebagai individu yang dihormati dan dipercaya oleh komunitas setempat.

Peran guru dalam pencegahan kekerasan tidak hanya terbatas pada fungsi pendidikan formal, tetapi juga mencakup fungsi perlindungan dan pendampingan sosial. Hidayah dan Umaroh (2025) menunjukkan bahwa guru dan konselor sebaya memiliki posisi strategis dalam mencegah kekerasan seksual melalui edukasi, pendampingan, serta pembentukan lingkungan sekolah yang aman. Dalam konteks komunitas pekerja migran yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan perlindungan, guru sering kali menjadi individu pertama yang dapat mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan maupun perubahan perilaku pada anak dan

keluarga.

Meskipun guru berinteraksi langsung dengan anak-anak, peran mereka dalam perlindungan perempuan juga sangat penting. Dalam komunitas pekerja migran, guru sering menjadi figur yang dipercaya oleh ibu, remaja putri, dan keluarga pekerja migran untuk berkonsultasi tentang berbagai persoalan sosial yang dihadapi. Banyak kasus kekerasan terhadap perempuan berdampak langsung pada kondisi psikologis dan kesejahteraan anak di rumah maupun di sekolah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas guru dalam mengenali tanda-tanda kekerasan terhadap perempuan tidak hanya penting untuk melindungi korban perempuan, tetapi juga untuk mencegah dampak lanjutan yang dapat memengaruhi tumbuh kembang anak. Dengan demikian, pendekatan perlindungan anak dan perempuan perlu dipandang sebagai satu kesatuan dalam konteks komunitas pekerja migran.

Sebagian besar guru belum mendapatkan pelatihan khusus untuk mengenali tanda-tanda kekerasan dan cara menangani kasus kekerasan, sehingga menjadi kendala utama dalam upaya pencegahan. Terlebih lagi, keterbatasan akses terhadap layanan perlindungan sosial resmi di wilayah perkebunan kelapa sawit memperburuk kondisi ini. Situasi geografis yang terpencil membuat guru sulit merujuk kasus ke lembaga yang berotoritas menangani kekerasan. Selain itu, norma sosial dan stigma terkait isu kekerasan dan kesetaraan gender juga menghambat para guru untuk menangani kasus-kasus ini dengan efektif (Amnesty International, 2022).

Kondisi ini sejalan dengan laporan UNICEF (2020) yang menunjukkan bahwa guru merupakan salah satu aktor kunci dalam sistem perlindungan anak di sekolah karena memiliki peluang terbesar untuk mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan secara dini. UNESCO (2021) juga menegaskan bahwa pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan memerlukan keterlibatan aktif guru, penguatan kapasitas sekolah, serta tersedianya mekanisme pelaporan dan rujukan yang jelas bagi korban.

Mempertimbangkan potensi dan kendala yang dihadapi para guru, pemberdayaan guru sebagai relawan pencegah kekerasan di FGV Sahabat menjadi sangat mendesak. Guru dipilih sebagai relawan strategis karena peran mereka yang langsung berhubungan dengan anak-anak dan perempuan di komunitas. Guru yang dilatih untuk menangani kasus kekerasan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman di FGV Sahabat, khususnya, serta bagi pekerja migran secara umum.

Pemilihan program intervensi dengan pemberdayaan guru berdasarkan penelitian terdahulu bahwa program pelatihan bagi guru telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pengetahuan dan kemampuan mereka dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap anak (Hamid et al., 2023). Selain

itu penerapan sekolah ramah anak dan pendidikan hak asasi manusia dapat membantu meminimalkan kekerasan di lingkungan pendidikan (Khoiriyah & Filasofa, 2024; Khoiryasdien, 2020). Pemberdayaan guru sebagai relawan yang efektif dalam pencegahan kekerasan terhadap anak. Langkah ini sejalan dengan studi Kodriat, dkk., yang menyoroti pentingnya pendidikan sebagai sarana pemberdayaan anak-anak PMI (Kodriati et al., 2023). Melalui pemberdayaan guru, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman bagi perempuan dan anak-anak di kawasan perkebunan, serta menjadi model yang dapat diterapkan di wilayah lain dengan kondisi serupa.

Berbagai program pencegahan kekerasan yang telah dilaksanakan sebelumnya umumnya berfokus pada pemberdayaan masyarakat secara umum (Praptingsih & Tarmini, 2022), pendidikan kesetaraan gender (Anggraeni & Muna, 2023), penggunaan media sosial sebagai sarana edukasi pencegahan kekerasan (Setyaningsih & Ramadhan, 2022), maupun program pengasuhan keluarga untuk mencegah kekerasan terhadap anak (Lachman et al., 2023). Namun demikian, program yang secara khusus menempatkan guru sebagai relawan perlindungan anak dan perempuan di komunitas pekerja migran Indonesia di luar negeri masih sangat terbatas. Selain itu, sebagian besar program sebelumnya dilaksanakan di komunitas umum atau sekolah formal yang memiliki akses relatif lebih baik terhadap layanan perlindungan sosial. Oleh karena itu, program ini menawarkan pendekatan yang berbeda melalui pemberdayaan guru sebagai relawan perlindungan anak dan perempuan di kawasan perkebunan kelapa sawit yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan perlindungan serta pendampingan profesional.

Meskipun berbagai penelitian dan program sebelumnya telah menunjukkan efektivitas pelatihan guru dalam meningkatkan pengetahuan mengenai perlindungan anak, sebagian besar pelatihan tersebut masih dilaksanakan dalam konteks sekolah formal di Indonesia, dengan dukungan sistem perlindungan anak yang relatif lebih memadai. Hingga saat ini, program yang secara khusus dirancang untuk memberdayakan guru di *Community Learning Center* (CLC) pada komunitas pekerja migran Indonesia di luar negeri masih sangat terbatas, terutama di kawasan perkebunan kelapa sawit yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Selain itu, sebagian besar program terdahulu berfokus pada perlindungan anak, sementara integrasi perlindungan anak dan perempuan dalam satu model pemberdayaan guru masih relatif jarang. Kesenjangan inilah yang mendasari pentingnya pelaksanaan program ini.

Kebaruan program ini terletak pada pengembangan model pemberdayaan guru sebagai relawan perlindungan anak dan perempuan di komunitas pekerja migran Indonesia di luar negeri. Berbeda dengan pelatihan guru pada umumnya yang berfokus pada peningkatan pengetahuan semata, program ini mengintegrasikan tiga komponen utama, yaitu peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan partisipatif, penyediaan fasilitas edukasi berkelanjutan melalui Pojok Baca, serta penguatan jejaring kelembagaan melalui kolaborasi antara Universitas Terbuka, Universiti Malaysia Sabah, FGV Holdings Berhad, dan CLC FGV Sahabat. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan model pencegahan kekerasan yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan karakteristik komunitas pekerja migran di wilayah perkebunan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, program Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas guru di CLC FGV Sahabat sebagai relawan pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan melalui pelatihan, penyediaan fasilitas edukasi, serta penguatan jejaring kolaborasi. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan guru mengenai identifikasi dan penanganan kasus kekerasan, memperkuat kemampuan mereka dalam melakukan edukasi pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah, serta mengembangkan model pemberdayaan guru yang dapat direplikasi pada komunitas pekerja migran Indonesia lainnya dengan karakteristik serupa.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini adalah metode partisipatif (*participatory approach*) yang melibatkan peserta sasaran secara aktif sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Sasaran kegiatan adalah guru-guru *Community Learning Center* (CLC) FGV Sahabat yang berlokasi di Lahad Datu, Sabah, Malaysia. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 13–15 Juni 2024 dan melibatkan 45 guru dari sembilan CLC yang dikelola oleh FGV Holdings Berhad.

Pelaksanaan program diawali dengan tahap persiapan yang meliputi pemilihan mitra dan analisis kebutuhan (*needs assessment*). Analisis kebutuhan dilakukan melalui observasi lapangan, diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion/FGD*), serta wawancara dengan pengelola CLC, guru, dan perwakilan FGV. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan bahwa sebagian besar guru belum pernah memperoleh pelatihan formal mengenai identifikasi, pencegahan, dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Selain itu, guru mengalami keterbatasan

akses terhadap sumber belajar, prosedur pelaporan kasus, dan jaringan layanan perlindungan yang dapat diakses di kawasan perkebunan.

Tahap pelaksanaan program terdiri atas tiga sesi utama yang dilaksanakan selama tiga hari. Sesi pertama berjudul *Empowering Teachers as Volunteers to Prevent Violence Against Children and Women*, yang membahas konsep dasar kekerasan terhadap anak dan perempuan, bentuk-bentuk kekerasan, faktor risiko, serta peran guru sebagai relawan dalam upaya pencegahan. Sesi kedua berjudul *The Violence Against Women and Children Prevention Program: A Microsystem Intervention*, yang membahas strategi pencegahan kekerasan melalui pendekatan keluarga, sekolah, dan komunitas, termasuk mekanisme identifikasi, pelaporan, serta penanganan kasus. Sesi ketiga berjudul *Cultivating the Entrepreneurial Spirit of Teachers Through Teacherpreneur Program*, yang berfokus pada penguatan kapasitas guru dalam mengembangkan kreativitas, kemandirian ekonomi, dan inovasi pendidikan sebagai bagian dari pemberdayaan komunitas. Setiap sesi berlangsung selama 120–150 menit dan disampaikan melalui kombinasi metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, serta sesi tanya jawab. Narasumber berasal dari Universitas Terbuka dan Universiti Malaysia Sabah yang memiliki keahlian di bidang pendidikan, perlindungan anak, psikologi, dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mengukur efektivitas program, dilakukan evaluasi menggunakan desain pre-test dan post-test yang mengukur pemahaman peserta mengenai jenis-jenis kekerasan, cyberbullying, prosedur pelaporan, serta peran guru dalam pencegahan kekerasan. Selain itu, dilakukan observasi partisipasi peserta selama pelatihan serta pengumpulan umpan balik melalui diskusi reflektif.

Sebagai bentuk keberlanjutan program, tim PKM menyediakan fasilitas pendukung berupa perpustakaan mini “Pojok Baca CLC FGV Sahabat”, rak buku, koleksi buku edukatif, media pembelajaran, serta perangkat televisi edukatif. Fasilitas ini dirancang untuk mendukung literasi perlindungan anak dan perempuan, memperkaya sumber belajar bagi guru, serta menjadi pusat edukasi berkelanjutan bagi siswa dan komunitas pekerja migran Indonesia di lingkungan CLC. Tahap akhir kegiatan meliputi penyusunan laporan, publikasi hasil kegiatan di media massa dan media sosial, serta diseminasi hasil kepada mitra sebagai dasar pengembangan program lanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

3.1.1. Penjajakan Program Kerja Sama dan Persiapan

Pada tahap awal persiapan program, tim PkM memilih CLC FGV Sahabat di Lahad Datu, Sabah, Malaysia, sebagai lokasi utama karena tingginya risiko kekerasan terhadap anak dan perempuan serta keterbatasan akses pendidikan di komunitas pekerja migran. Universiti Malaysia Sabah (UMS), CLC FGV Sahabat, dan FGV Holding Berhad Malaysia dipilih sebagai mitra utama untuk mendukung keberlanjutan program ini. Selanjutnya, dilakukan analisis kebutuhan bersama mitra melalui diskusi dan wawancara mendalam. Pertemuan inisiasi kerja sama antara tim PkM dengan UMS, CLC FGV Sahabat, dan FGV Holding Berhad menegaskan komitmen bersama dalam mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi komunitas, khususnya terkait kekerasan. Analisis ini menjadi dasar perancangan materi pelatihan dan fasilitas pendukung yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kerja sama formal pertama dilakukan dengan Universiti Malaysia Sabah (UMS) pada 18 Agustus 2023. Universiti Malaysia Sabah dipilih sebagai mitra kolaborasi strategis karena kehadirannya sebagai institusi pendidikan lokal yang memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi sosial di Sabah.



Gambar 1. Penandatanganan perjanjian kerja sama dan diskusi Program PkM: UT-UMS-CLC-FGV

Pada 12 Juni 2024, universitas kami melanjutkan kerja sama dengan menandatangani perjanjian dengan FGV Holding Berhad Malaysia. FGV Holding Berhad adalah salah satu perusahaan besar yang mengelola perkebunan kelapa sawit di Sabah, termasuk wilayah tempat CLC FGV Sahabat berlokasi. Kerja sama dengan FGV bertujuan memperkuat dukungan bagi komunitas buruh migran yang bekerja di wilayah perkebunan tersebut.

3.1.2 Penyampaian Materi dan Pelatihan

Pada 13 Juni 2024, tim PkM mengunjungi CLC FGV Sahabat untuk menyampaikan materi. Kegiatan pengabdian berupa kunjungan ke CLC FGV Sahabat untuk menyampaikan materi pelatihan. Sesi ini diikuti oleh 45 guru sebagai peserta utama program. Para guru ini memiliki latar belakang yang beragam, mencakup variasi tingkat pendidikan, etnisitas, kebangsaan, agama, serta kondisi sosial ekonomi. Meski demikian, peserta menunjukkan semangat dan antusiasme yang tinggi dalam

Erna Risnawati, et al.

mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sepanjang hari tersebut. Keberagaman peserta ini memperkaya dinamika diskusi dan pemahaman terhadap materi, karena setiap individu membawa perspektif yang berbeda sesuai dengan pengalaman hidup dan budaya masing-masing.



Gambar 2. Peserta PkM yang merupakan guru-guru di CLC FGV Sahabat

Program pelatihan ini diikuti oleh 45 orang guru yang berasal dari 9 lokasi CLC di seluruh wilayah CLC FGV Sahabat. Sebagian besar peserta (80%) adalah warga negara Indonesia (WNI), sementara 20% lainnya adalah warga negara asing (WNA). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga pengajar di CLC FGV Sahabat adalah orang Indonesia, yang mencerminkan populasi besar pekerja migran Indonesia di wilayah tersebut.

Sebanyak 70% peserta memiliki latar belakang pendidikan SMA (*high school*), sedangkan 30% lainnya adalah lulusan perguruan tinggi (*graduate*). Proporsi yang signifikan dari guru berpendidikan SMA menunjukkan bahwa banyak tenaga pengajar di komunitas ini mungkin belum mendapatkan pelatihan formal dalam bidang pendidikan atau keterampilan pencegahan kekerasan, sehingga pelatihan ini menjadi penting dalam meningkatkan kapasitas mereka.

Jika dilihat dari jenis kelaminnya, mayoritas peserta adalah perempuan, yaitu 72%, sementara sisanya (28%) adalah laki-laki. Dominasi perempuan dalam kelompok guru di CLC FGV Sahabat ini mencerminkan tren umum di sektor pendidikan dasar di banyak wilayah, di mana tenaga pengajar perempuan lebih banyak terlibat. Ini juga menekankan pentingnya pelatihan dalam perspektif gender, mengingat perempuan lebih rentan terhadap kekerasan di lingkungan mereka.

Pada sesi pemaparan materi, disampaikan materi terkait kekerasan terhadap anak dan perempuan. Materi tersebut dibawakan dengan sangat interaktif, sehingga

peserta dapat memahaminya dengan baik. Di akhir sesi, peserta diminta untuk menyebutkan kembali materi yang telah diberikan untuk menguji pemahaman mereka. Selain menguji pemahaman, peserta juga diminta untuk menyampaikan pengalaman mereka terkait kekerasan terhadap anak dan perempuan yang pernah mereka temukan di sekolah. Permasalahan akses untuk melaporkan kasus menjadi salah satu kendala yang dihadapi para guru. Selain itu, keterbatasan informasi terkait kekerasan juga menjadi kendala bagi para guru dalam mengedukasi siswa di sekolah. Untuk itulah, tim PkM juga menyediakan buku bacaan yang tidak hanya dapat digunakan oleh para guru, tetapi juga oleh siswa untuk menambah pengetahuan mereka tentang otonomi tubuh agar terhindar dari kekerasan.

3.1.3 Penyediaan Fasilitas Edukasi dan Media Pembelajaran

Selain pelatihan, tim PkM juga menyediakan berbagai media dan fasilitas pembelajaran, yaitu TV, buku, dan perlengkapan perpustakaan untuk mendukung pemahaman lebih lanjut. Pojok Baca didirikan di CLC FGV Sahabat, dilengkapi dengan buku bacaan dan perlengkapan perpustakaan. Fasilitas ini berfungsi untuk mendukung perkembangan literasi anak serta memberikan informasi tentang pencegahan kekerasan.



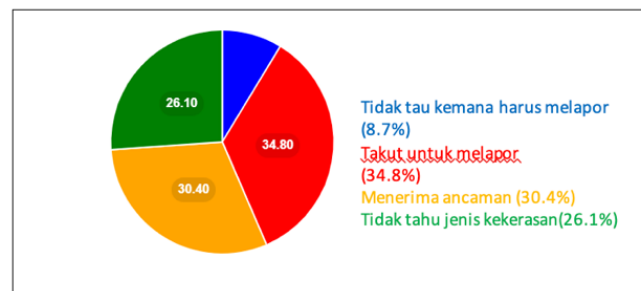
Gambar 3. Penyediaan fasilitas edukasi (a) pojok baca (b) TV

Penyediaan fasilitas edukasi ini menjadi langkah preventif berkelanjutan yang dapat diakses oleh siswa dan guru. Pojok Baca menyediakan sumber daya bagi anak-anak untuk mempelajari hak-hak mereka, mengenali emosi, serta memahami konsep keamanan diri. Dampak jangka panjangnya adalah membentuk budaya sekolah yang menghargai literasi dan kesadaran akan kekerasan

3.1.4 Dampak Program PKM Terhadap Guru

Untuk mengetahui dampak dan kebermanfaatan program PkM, tim PkM melakukan survei pre-test dan post-test terhadap 45 peserta untuk mengukur pengetahuan dan sikap mereka sebelum dan setelah intervensi pelatihan. Survei ini berfokus pada pemahaman peserta tentang kekerasan, jenis-jenis kekerasan (termasuk cyberbullying), keberanian untuk melapor, serta pemahaman mengenai prosedur pelaporan. Hasil survei ini memberikan wawasan yang berharga tentang efektivitas

intervensi program dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan peserta, serta menunjukkan area yang memerlukan peningkatan lebih lanjut.



Gambar 4. Identifikasi hambatan utama pelaporan kasus kekerasan

Berdasarkan gambar di atas, hasil survei mengidentifikasi beberapa hambatan utama yang dihadapi peserta dalam melaporkan kasus kekerasan. Hambatan terbesar adalah ketakutan untuk melapor yang dialami oleh 34,8% peserta. Ketakutan ini menunjukkan bahwa banyak peserta khawatir akan dampak sosial atau konsekuensi negatif yang mungkin mereka hadapi setelah melapor, seperti stigma atau diskriminasi dari lingkungan sekitar. Hambatan lainnya adalah ancaman dari pelaku yang dialami oleh 30,4% peserta. Ancaman ini semakin memperkuat alasan para korban untuk tidak melaporkan kekerasan yang mereka alami, karena adanya intimidasi dari pelaku yang berpotensi membahayakan mereka. Selain itu, 26,1% peserta mengaku tidak menyadari bahwa tindakan tertentu yang mungkin dianggap “biasa” atau normal sebenarnya merupakan bentuk kekerasan seksual. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan dalam pemahaman mengenai apa saja yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual, sehingga sebagian korban tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban kekerasan. Sementara itu, 8,7% peserta lainnya tidak tahu harus melapor ke mana, yang menunjukkan perlunya edukasi lebih lanjut mengenai jalur pelaporan serta akses ke layanan yang aman.



Gambar 5. Peningkatan pengetahuan peserta

Gambar di atas menunjukkan hasil survei pre-test dan post-test yang memberikan gambaran jelas mengenai peningkatan pengetahuan dan sikap peserta setelah pelaksanaan program pelatihan. Pada aspek pengetahuan tentang jenis kekerasan, terlihat peningkatan yang signifikan dari sekitar 60% pada pre-test menjadi

lebih dari 90% pada post-test. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan tersebut berhasil memberikan pemahaman yang komprehensif kepada peserta tentang berbagai jenis kekerasan yang mungkin terjadi di lingkungan mereka, yang menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan.

Pada aspek pengetahuan tentang *cyberbullying*, terdapat peningkatan drastis setelah program, yang mengindikasikan efektivitas pelatihan dalam memberikan wawasan kepada peserta tentang bentuk-bentuk kekerasan yang lebih kontemporer dan relevan, khususnya di era digital. Peningkatan pemahaman mengenai *cyberbullying* ini sangat penting, mengingat ancaman kekerasan digital yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi.

Sementara itu, keberanian untuk melapor kekerasan juga menunjukkan peningkatan setelah pelatihan, meskipun kenaikannya relatif kecil dibandingkan dengan aspek pengetahuan lainnya. Ini menandakan bahwa meskipun peserta lebih sadar akan pentingnya melapor, masih ada hambatan psikologis yang perlu diatasi, seperti ketakutan terhadap stigma atau konsekuensi pelaporan. Hambatan ini menunjukkan bahwa dibutuhkan pendekatan lebih lanjut untuk membangun keberanian yang lebih besar pada peserta agar mereka merasa aman dan didukung saat melaporkan kasus kekerasan.

Pada aspek pengetahuan tentang prosedur pelaporan, terjadi peningkatan dari *pre-test* ke *post-test*, yang menunjukkan bahwa program ini berhasil memperkenalkan mekanisme pelaporan kepada peserta. Namun, peningkatan yang relatif kecil dibandingkan dengan aspek pengetahuan lainnya mengindikasikan bahwa diperlukan edukasi tambahan untuk memperkuat pemahaman tentang jalur pelaporan yang tersedia. Edukasi lanjutan ini akan membantu peserta agar lebih siap dan mengetahui langkah-langkah yang harus diambil ketika menghadapi atau menyaksikan kasus kekerasan, sehingga dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan responsif terhadap kekerasan.

3.2. Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelatihan berhasil meningkatkan pemahaman guru mengenai berbagai bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan, termasuk kekerasan fisik, emosional, seksual, serta *cyberbullying*. Peningkatan pemahaman yang terlihat dari hasil *pre-test* dan *post-test* menunjukkan bahwa guru memiliki kebutuhan tinggi akan informasi dan pelatihan terkait perlindungan anak dan perempuan di lingkungan sekolah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hamid et al. (2023) yang menunjukkan bahwa pelatihan bagi guru dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam mengenali dan menangani kasus kekerasan

terhadap anak. Temuan serupa juga dilaporkan oleh Sedyono et al. (2018) yang menemukan bahwa pemberdayaan guru melalui pelatihan dan media edukasi mampu meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan sosialisasi perilaku anti-kekerasan seksual di sekolah dasar. Selain itu, penelitian Hidayah dan Umaroh (2025) menunjukkan bahwa guru memiliki peran strategis dalam pencegahan kekerasan seksual melalui edukasi, pendampingan, serta penciptaan lingkungan belajar yang aman bagi peserta didik.

Peningkatan pemahaman guru dalam program ini menjadi sangat penting mengingat posisi guru di *Community Learning Center* (CLC) tidak hanya sebagai pendidik, tetapi juga sebagai figur yang dipercaya oleh anak-anak dan keluarga pekerja migran. Dalam konteks komunitas pekerja migran Indonesia di Sabah, guru sering kali menjadi pihak pertama yang berinteraksi secara intensif dengan anak-anak sehingga memiliki peluang lebih besar untuk mengenali tanda-tanda kekerasan, perubahan perilaku, maupun kondisi keluarga yang berisiko. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa investasi dalam peningkatan kapasitas guru dapat menjadi salah satu strategi preventif yang efektif dalam membangun sistem perlindungan anak dan perempuan di komunitas pekerja migran.

Selain meningkatkan pengetahuan, program ini juga berhasil memperluas pemahaman guru tentang mekanisme pelaporan kasus kekerasan. Namun demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa peningkatan keberanian untuk melaporkan kasus masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan pengetahuan yang diperoleh peserta. Temuan ini mengindikasikan bahwa hambatan pelaporan tidak hanya disebabkan oleh kurangnya informasi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, dan struktural. Choo et al. (2013) menemukan bahwa sebagian guru di Malaysia masih merasa ragu untuk melaporkan kasus kekerasan karena kekhawatiran terhadap konsekuensi hukum, ketidakpastian dalam mengidentifikasi kasus, serta kurangnya dukungan institusional. Selain itu, korban maupun saksi kekerasan sering kali enggan melapor karena takut terhadap ancaman pelaku, khawatir akan stigma sosial, atau tidak yakin bahwa laporan yang disampaikan akan memperoleh tindak lanjut yang memadai (Abdul-Ghani, 2014; Amnesty International, 2022). Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks di komunitas pekerja migran yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan perlindungan sosial dan bantuan hukum.

Temuan lain yang penting adalah masih adanya peserta yang belum memahami bahwa tindakan tertentu dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual maupun kekerasan berbasis gender. Hal ini menunjukkan bahwa literasi perlindungan anak

dan perempuan di lingkungan pekerja migran masih memerlukan penguatan yang berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Othman dan Yahya (2013) yang menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan seksual pada anak di Malaysia masih relatif rendah sehingga diperlukan intervensi pendidikan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, program ini tidak hanya berfokus pada pelatihan, tetapi juga menyediakan fasilitas edukasi berupa Pojok Baca CLC FGV Sahabat yang dilengkapi dengan buku, media pembelajaran, serta sumber informasi tentang perlindungan anak dan perempuan. Penyediaan fasilitas ini diharapkan dapat memperkuat proses pembelajaran berkelanjutan setelah pelatihan selesai dilaksanakan.

Keberadaan Pojok Baca memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar menyediakan bahan bacaan. Fasilitas tersebut menjadi pusat literasi komunitas yang dapat dimanfaatkan oleh guru, siswa, maupun keluarga pekerja migran untuk memperoleh informasi mengenai hak-hak anak, kesetaraan gender, pencegahan kekerasan, serta pengembangan karakter. Anggraeni dan Muna (2023) menegaskan bahwa pendidikan berbasis komunitas merupakan salah satu pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan demikian, penyediaan fasilitas edukasi menjadi bagian penting dari strategi pemberdayaan yang mendukung perubahan perilaku dalam jangka panjang.

Dari perspektif pemberdayaan masyarakat, program ini menunjukkan bahwa guru dapat berfungsi sebagai agen perubahan yang strategis dalam upaya pencegahan kekerasan. Kedekatan guru dengan anak-anak dan keluarga pekerja migran memungkinkan mereka berperan sebagai pendidik, pendamping, detektor dini kasus kekerasan, sekaligus penghubung dengan layanan perlindungan yang tersedia. Temuan ini mendukung penelitian Kodriati et al. (2023) yang menegaskan pentingnya pendidikan dalam memperkuat perlindungan anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia. Selain itu, pendekatan kerelawanan yang digunakan dalam program ini sejalan dengan temuan Sahri et al. (2013) yang menunjukkan bahwa keterlibatan individu dalam aktivitas kerelawanan dapat meningkatkan kapasitas sosial komunitas serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial.

Temuan ini sejalan dengan rekomendasi UNICEF (2020) dan UNESCO (2021) yang menempatkan guru sebagai komponen utama dalam sistem perlindungan anak berbasis sekolah. Kedua lembaga tersebut menekankan bahwa peningkatan kapasitas guru dalam mengenali, mencegah, dan merespons kekerasan merupakan salah satu

strategi yang paling efektif untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Dalam konteks komunitas pekerja migran yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan perlindungan profesional, peran guru menjadi semakin penting sebagai garda terdepan dalam deteksi dini dan pendampingan awal bagi para korban.

Salah satu kontribusi penting program ini adalah pengembangan model pemberdayaan guru sebagai relawan perlindungan anak dan perempuan di komunitas pekerja migran lintas negara. Berbeda dengan program-program sebelumnya yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat umum (Praptingsih & Tarmini, 2022), pendidikan kesetaraan gender (Anggraeni & Muna, 2023), penggunaan media sosial untuk pencegahan kekerasan (Setyaningsih & Ramadhan, 2022), atau program pengasuhan keluarga (Lachman et al., 2023), program ini secara khusus menempatkan guru sebagai aktor utama dalam sistem perlindungan komunitas. Pendekatan ini menjadi relevan mengingat keterbatasan akses terhadap tenaga profesional dan lembaga perlindungan di kawasan perkebunan kelapa sawit yang terpencil. Guru yang telah mengikuti pelatihan diharapkan dapat melanjutkan peran sebagai relawan melalui kegiatan edukasi rutin di sekolah, integrasi materi perlindungan anak ke dalam pembelajaran, identifikasi dini terhadap kasus kekerasan, serta pendampingan awal sebelum korban dirujuk kepada pihak yang berwenang.

Meskipun menunjukkan hasil yang positif, program ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, jumlah peserta masih terbatas pada 45 guru dari sembilan CLC yang berada dalam satu kawasan perkebunan FGV Sahabat sehingga hasil program belum dapat digeneralisasikan pada seluruh komunitas pekerja migran Indonesia di Malaysia. Kedua, evaluasi yang dilakukan masih bersifat jangka pendek dan berfokus pada perubahan pengetahuan serta persepsi peserta setelah pelatihan. Oleh karena itu, penelitian dan program lanjutan diperlukan untuk mengevaluasi perubahan perilaku guru, efektivitas pelaporan kasus, serta dampak program terhadap pengurangan risiko kekerasan dalam jangka panjang. Meskipun demikian, hasil awal yang diperoleh menunjukkan bahwa model pemberdayaan guru sebagai relawan berpotensi direplikasi pada komunitas pekerja migran lainnya di Malaysia maupun di negara lain yang menghadapi tantangan serupa dalam perlindungan anak dan perempuan.

4. KESIMPULAN

Program Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di CLC FGV Sahabat, Lahad Datu, Sabah, Malaysia, berhasil meningkatkan kapasitas guru dalam mengenali, mencegah, dan merespons kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan

di lingkungan komunitas pekerja migran Indonesia. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, emosional, seksual, dan cyberbullying, dari sekitar 60% sebelum pelatihan menjadi lebih dari 90% setelah pelatihan. Selain itu, guru memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme pelaporan kasus serta peran strategis mereka dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung bagi anak-anak pekerja migran.

Kontribusi utama program ini terletak pada pengembangan model pemberdayaan guru sebagai relawan pencegahan kekerasan di komunitas pekerja migran lintas negara. Berbeda dengan program pelatihan guru pada umumnya yang berfokus pada peningkatan pengetahuan, program ini mengintegrasikan pelatihan partisipatif, penyediaan fasilitas edukasi berkelanjutan melalui Pojok Baca CLC FGV Sahabat, serta penguatan kolaborasi antara Universitas Terbuka, Universiti Malaysia Sabah, FGV Holdings Berhad, dan pengelola CLC. Melalui pendekatan tersebut, guru tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga sebagai agen perlindungan yang mampu melakukan edukasi, deteksi dini, pendampingan awal, serta rujukan kasus kekerasan di lingkungan komunitasnya.

Meskipun menunjukkan hasil yang positif, program ini memiliki beberapa keterbatasan. Jumlah peserta masih terbatas pada 45 guru dari satu komunitas CLC sehingga temuan belum dapat digeneralisasikan pada seluruh komunitas pekerja migran Indonesia di Malaysia. Selain itu, evaluasi yang dilakukan masih bersifat jangka pendek dan berfokus pada perubahan pengetahuan serta persepsi peserta setelah pelatihan. Oleh karena itu, belum dapat diketahui sejauh mana perubahan perilaku guru maupun dampak program terhadap penurunan kasus kekerasan dalam jangka panjang.

Untuk menjaga keberlanjutan program, guru yang telah mengikuti pelatihan diharapkan dapat menjalankan peran sebagai relawan perlindungan anak dan perempuan melalui kegiatan edukasi rutin di sekolah, identifikasi dini terhadap kasus kekerasan, serta pendampingan awal bagi siswa dan keluarga yang membutuhkan bantuan. Ke depan, diperlukan pelatihan lanjutan, pembentukan mekanisme pelaporan kekerasan yang lebih terstruktur di lingkungan CLC, serta penguatan jejaring dengan lembaga perlindungan anak dan perempuan, perwakilan pemerintah Indonesia, serta organisasi masyarakat setempat. Dengan dukungan berbagai pemangku kepentingan, model pemberdayaan guru sebagai relawan ini berpotensi direplikasi di komunitas pekerja migran lainnya di Malaysia maupun di negara lain dengan karakteristik serupa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Terbuka dan LPPM UT, FKIP UT dan FHSIP UT atas dukungan penuh dalam program Pengabdian kepada Masyarakat ini, serta kepada Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT) sebagai pemberi dana hibah. Terima kasih juga kepada Universiti Malaysia Sabah, CLC FGV, Mahasiswa UT di Sabah, Pimpinan FGV Holding Berhad di Sabah, Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), KJRI Tawau, Atdikbud Tawau, dan Pensosbud atas kolaborasi luar biasa dalam program ini. Penghargaan khusus kami sampaikan kepada para guru CLC FGV Sahabat dan tim pelaksana PkM yang telah bekerja dengan penuh dedikasi. Semoga kolaborasi ini membawa manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan mampu menciptakan lingkungan yang aman serta mendukung bagi anak-anak dan perempuan. Kepada semua pihak yang memberikan andil dalam kegiatan ini.

REFERENSI

- Abdul-Ghani, M. (2014). *Exploring domestic violence experiences from the perspective of abused women in Malaysia*.
- Amnesty International. (2022). *Laporan Amnesty International 2022/2023: Situasi hak asasi manusia secara global*.
- Anggraeni, D., & Muna, N. (2023). Gender equality education for the preventive domestic violence against women and children—*Islamic Studies Journal for Social Transformation*.
- Annisa, R. N. (2021). *Diplomasi pendidikan pemerintah Indonesia dalam memenuhi hak pendidikan anak TKI di Tawau, Sabah, Malaysia (Studi kasus: Keberadaan CLC Indonesia di Tawau, Sabah Malaysia tahun 2017–2020)* [Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta].
- Choo, W. Y., Dunne, M. P., Marret, M. J., Fleming, M., Martin, J., & Teo, C. (2013). Are Malaysian teachers ready to assume the duties of reporting child abuse and neglect? *Child Abuse Review*, 22(4), 302–314.
- Damayanti, C., Dewi, U. N. M., & Permatasari, D. G. (2023). Diplomasi pendidikan Sabah Bridge dalam memenuhi hak pendidikan bagi anak pekerja migran Indonesia di Sabah, Malaysia. *Indonesian Journal of International Relations*, 7(2), 194–211. <https://doi.org/10.32787/ijir.v7i2.440>
- Febrianti, N. Z., & Afifah, W. (2023). Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang mengalami kekerasan di luar negeri. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 191–203. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.174>

- Fallahi, B., Rahpaymaelizhehee, S., & Kojour, R. J. (2015). The national policy of Malaysia toward violence against women. *Public Policy and Administration Research*, 5(10), 1–8.
- Hamdi, S. (2021). Tantangan migrasi, pengelolaan remitansi, dan kekerasan terhadap buruh migran perempuan asal Lombok di Malaysia dan Arab Saudi. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 3(1), 22–24. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v3i1.60>
- Hamid, A., Wahira, W., & HB, L. (2023). Pelatihan pencegahan dan penanganan kekerasan anak di sekolah dasar. *SEMAR: Jurnal Sosial dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 71–75. <https://doi.org/10.59966/semar.v1i01.100>
- Hidayah, A., Susilo, W., & Mulyadi. (2015). *Seluruh kebijakan (minus) perlindungan buruh migran Indonesia*. Migrant CARE.
- Hidayah, L. N., & Umaroh, A. K. (2025). Overview of the role of teachers and peer counselors in the prevention of sexual violence in child-friendly schools. *Promotor*.
- Khoiriyah, D. M., & Filasofa, L. M. K. (2024). Penerapan sekolah ramah anak untuk pencegahan kekerasan seksual. *Aulad: Journal on Early Childhood*, 7(2). <https://doi.org/10.31004/aulad.v7i2.674>
- Khoiryasdien, A. D. (2020). Peningkatan efikasi guru KB/TK 'Aisyiyah Nyai Ahmad Dahlan dalam mengajarkan pencegahan kekerasan seksual pada anak usia dini. *Jurnal Varidika*, 32(1), 16–22. <https://doi.org/10.23917/varidika.v32i1.10860>
- Kodriati, N., Pranungsari, D., Novitasari, P. R., Fitriani, I., Putri, N. S., & Hanastiti. (2023). Educating the children of Indonesian migrant workers in Malaysia about sexual violence prevention. *JAMAS: Jurnal Abdi Masyarakat*, 1(3), 310–314.
- Komnas Perempuan. (2024). *Lembar fakta CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2023*. Komnas Perempuan.
- Lachman, J. M., Rudin, J. R., Flisher, A. J., Pienaar, D., Ward, C. L., Hutchings, J., Cluver, L., Gardner, F., & others. (2023). “Before I was like a Tarzan. But now, I take a pause”: Mixed methods feasibility study of the Naungan Kasih parenting program to prevent violence against children in Malaysia. *BMC Public Health*, 23.
- Maksum, M. N. R., Inayati, N. L., Wachidi, A., Nisa, A. T., Khoirun Nissa, I., & others. (2026). Pencegahan bullying: Pendekatan edukasi dan psikososial di Sam Tengku Ampuan Jemaah Sungai Besar Selangor Malaysia. *JURPIKAT*.
- Praptingsih, N. A., & Tarmini, W. (2022). Pemberdayaan relawan dalamantisipasi kekerasan pada perempuan dan anak. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(5).
- Praptni, I. A. T., & Wilani, N. M. A. (2024). Dampak psikologis pada anak korban kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7, 1861–

1864.

- Safitri, D., & Wibisono, A. A. (2023). Keamanan manusia pekerja migran Indonesia: Ketidakamanan dan perlindungannya. *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(2), 741–769. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n2.17>
- Sahri, M., Murad, K., Alias, A., & Sirajuddin, M. (2013). Empowering youth volunteerism: The importance and global motivating factors. *Journal of Educational and Social Research*, 3(7), 502–507.
- Samad, M. Y., Amanda, N., Manggabarani, M. T. C., Wastitya, N., Azis, A., Maya, H. B., & Indonesia, U. (2023). Pencegahan dan penanganan praktik pekerja migran Indonesia non prosedural (PMI-NP) melalui pendekatan intelijen strategis. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(4), 260–272.
- Sediyono, W. E., Kristinawati, M., & Paseleng, M. (2018). Empowering teachers in the socialization of the anti-sexual violence behavior in primary schools. *International Journal of Interactive Mobile Technologies*, 12(8), 130–140.
- Setyaningsih, A., & Ramadhan, M. F. A. (2022). Pelatihan penggunaan media sosial sebagai langkah pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Desa Pasir Gombong. *An-Nizam*.
- Sholina, C. A. (2022). Pemenuhan hak-hak asasi anak tenaga kerja Indonesia di perkebunan sawit di wilayah Tawau, Sabah, Malaysia. *Jurnal Pembangunan Manusia*, 3(1). <https://doi.org/10.7454/jpm.v3i1.1029>
- SIMFONI-PPA. (n.d.). *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak*. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- United Nations Children's Fund. (2020). *Ending violence in and around schools: A global review*. UNICEF. <https://www.unicef.org>
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2021). *Safe to learn: Global guidance on ending violence in schools*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org>
- Windary, S. (2022). Kontribusi non-government organization (NGO) dalam pendidikan anak tenaga kerja Indonesia (TKI) di Sabah. *TRANSBORDERS: International Relations Journal*, 5(2), 115–128. <https://doi.org/10.23969/transborders.v5i2.5916>
- World Health Organization, & Pan American Health Organization. (2013). *Understanding and addressing violence against women: Sexual violence*. World Health Organization.